

DISKURSUS GERAKAN RADIKALISME DI KALANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH

Said Romadlan

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA)

Nomor HP: 08128911880; email: said.ramadlan@gmail.com

ABSTRAK

Kajian ini fokus pada diskursus mengenai gerakan radikalisme di kalangan tokoh Muhammadiyah. Terdapat tiga isu yang menjadi indikator dari gerakan radikalisme yaitu bentuk dan dasar negara, jihad, dan toleransi. Dengan menggunakan analisis wacana Halliday-Hasan didapatkan hasil kajian sebagai berikut. Pertama, mengenai bentuk dan dasar negara, para tokoh Muhammadiyah sepakat bahwa Pancasila adalah kesepakatan terbaik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kedua, para tokoh Muhammadiyah mewacanakan jihad dengan berbagai makna yang intinya jihad bukanlah sekadar perang atau bom bunuh diri. Terakhir mengenai toleransi para tokoh Muhammadiyah percaya bahwa umat Islam sangat toleran dan terbuka.

Kata Kunci: Diskursus, Radikalisme, Muhammadiyah

PENDAHULUAN

Pasca Muktamar ke-46 atau Muktamar Satu Abad tahun 2010 di Yogyakarta, Muhammadiyah meneguhkan dirinya sebagai gerakan Islam Berkemajuan. Sebagai gerakan Islam Berkemajuan, Muhammadiyah menegaskan dirinya sebagai gerakan yang berwatak reformis-modernis. Berkemajuan mengandung arti pembaruan dan kemajuan sejalan dengan jiwa ajaran Islam. Menurut Haedar Nashir (2014: 42), Islam Berkemajuan secara substantif mengandung unsur-unsur penting dari reformisme dan modernisme Islam. Secara khusus relatif sama dengan gerakan Islam Progresif. Sebagai gerakan Islam Berkemajuan, maka ideologi Muhammadiyah berwatak reformis-modernis yang mengandung jiwa pembaruan dan kemajuan sejalan dengan jiwa ajaran Islam.

Sebagai gerakan Islam berkemajuan, tantangan terbesar Muhammadiyah saat ini adalah munculnya gerakan radikalisme dan fundamentalisme Islam di satu sisi, dan kekuatan neoliberalisme dan globalisme di sisi yang lain. Radikalisme dan fundamentalisme hadir dalam

wujud intoleransi dalam beragama, terorisme, dan antiperdamaian. Sedangkan neoliberalisme dan globalisme muncul dalam bentuk eksploitasi alam, dehumanisasi, dan penindasan kaum lemah (mustadzafin). Menurut Haedar Nashir, Muhammadiyah ingin umat Islam turut serta dalam gerakan pencerahan. Dengan kata lain, Muhammadiyah ingin menempatkan Islam sebagai Islam yang berkemajuan, yakni fokus untuk membangun peradaban. “Kami mendudukkan Islam lebih maju lagi. Bukan hanya Islam yang mengusung perdamaian, toleransi, kemanusiaan tanpa diskriminasi, tapi juga Islam yang maju, Islam yang obyektif, Islam yang membangun keadaban bangsa ke depan,” tutur Haedar Nashir. Terkait dengan gerakan radikal, menurutnya, melawan radikalisme bukan dengan deradikalisasi, tetapi dengan moderasi. “setiap radikalisme yang dilawan dengan deradikalisasi dikhawatirkan justru jadi pendulum dari ekstrem satu ke ekstrem lainnya. Akibatnya masalah tak akan pernah selesai” (Kompas, 5 Juni 2015).

Gerakan radikalisme, terutama dalam bentuk tindakan terorisme justru menemukan momentumnya Sejak dicanangkannya *war againts terrorism* oleh Presiden Amerika Serikat George W. Bush, setelah peristiwa 11 September 2001. Di Asia Tenggara peristiwa 11 September berdampak berbeda terhadap Islam. Menurut Bernard Adeney-Rissakotta (2005), propaganda *war againts terrorism* justru membangkitkan nasionalisme dan solidaritas antarumat Islam di beberapa negara. Hal ini karena adanya perasaan sebagai satu umat dan solidaritas keagamaan di kalangan umat Islam dalam menghadapi serangan Barat, terutama agresi Amerika Serikat di Irak dan Afghanistan.

Di Indonesia, 11 September justru memantik munculnya gerakan militan. Tidak berselang lama setelah George W. Bush menyanangkan perang terhadap terorisme global, berbagai kelompok Islam di Indonesia turun ke jalan memprotes tindakan Amerika Serikat tersebut. massa dari Front Pembela Islam (FPI), Front Pemuda Islam Surakarta, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gerakan Pemuda Islam (GPI), Front Hizbullah, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membanjiri jalan sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Menurut Noorhaidi Hasan (Nathan & Kamali, 2005), peristiwa 11 September menjadi legitimasi atau pembenaran atas tindakan yang dilakukan kelompok Islam radikal, termasuk jihad dan aksi-aksi anti-Barat lainnya. Wacana Islam radikal berkembang secara dominan di ranah publik. Implikasi lainnya dari peristiwa 11 September di Indonesia adalah meningkatnya ketegangan antara kelompok Islam radikal dan Islam liberal, dan menjadi pertentangan yang lebih terbuka.

Menurut Salim dan Azra (2003), kebangkitan Islam radikal di Indonesia saat ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta berikut: pertama, pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru, muncul sejumlah partai politik baru, termasuk partai politik Islam yang mengikuti pemilu pertama era reformasi, 7 Juni 1999. Kedua, kebangkitan kembali kelompok-kelompok Islam garis keras seperti FPI, MMI, dan Laskar Jihad. Ketiga, meningkatnya permintaan sejumlah daerah di Indonesia untuk menerapkan Peraturan Daerah (Perda) berbasis syari'ah Islam seperti yang sudah diterapkan di Nanggroe Aceh Darussalam. Keempat, meningkatnya popularitas media-media Islam garis keras, seperti Sabili dan Suara Hidayatullah.

Dalam perkembangannya, pengaruh gerakan radikal global baik dari Al Qedah maupun ISIS terhadap kelompok-kelompok Islam radikal di Indonesia juga semakin kuat. Kelompok-kelompok seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Islamiyah (JI), dan Lasykar Jihad (LJ) ditengarai memiliki hubungan erat dengan al Qaedah (Hasan, 2008; Ali, 2014). Meskipun masih simpang siur, beberapa warga Negara Indonesia juga menyatakan bergabung dengan ISIS, bahkan beberapa di antaranya pergi ke Suriah untuk ikut berperang di sana. Laporan Majalah Tempo (Majalah Tempo, edisi 10 Agustus 2014, hal. 26) menyebutkan bahwa jaringan ISIS telah berkembang dan meluas di beberapa daerah di Indonesia di antaranya di Sukoharjo Jawa Tengah dan Kota Malang Jawa Timur. Bahkan sempat muncul sebuah video ajakan warga Indonesia bergabung dengan ISIS yang beredar di Youtube. Dalam laporan utama Majalah Tempo edisi 5 April 2015 (hal. 32) dipaparkan hasil investigasi majalah tersebut yang membuktikan sejumlah kelompok di Indonesia diam-diam mengirim orang ke wilayah yang dikuasai ISIS. Berdasarkan laporan Majalah Tempo, perekrutannya kebanyakan merupakan bagian dari jaringan lama terorisme.

Sebagai gerakan Islam Berkemajuan, Muhammadiyah aktif membuka ruang-ruang publik, termasuk ruang publik baru agar tercipta wacana yang lebih seimbang mengenai gerakan radikalisme ini, seperti melalui pengajian, dakwah lapangan, keputusan pimpinan, gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi, diskusi publik, termasuk melalui media massa sebagai ranah publik baru, baik yang dimiliki oleh Muhammadiyah sendiri seperti Majalah Suara Muhammadiyah dan TVMU, maupun media-media publik dan media sosoal lainnya. Melalui ruang-ruang publik tersebut Muhammadiyah membuka dialog argumentatif dan memberi kesempatan atau ruang kepada publik untuk berperan serta mewujudkan demokratisasi publik.

Fokus utama kajian ini adalah bagaimana wacana atau diskursus mengenai gerakan radikalisme di kalangan tokoh Muhammadiyah. Diskursus ini merupakan respon atau sikap para tokoh Muhammadiyah tentang gerakan radikalisme yang berkembang, baik dalam praktik maupun wacana di ruang-ruang publik. Tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada publik mengenai pandangan para tokoh Muhammadiyah mengenai gerakan radikalisme, sekaligus sebagai wacana penyadaran bahwa gerakan radikalisme terutama dalam bentuk tindakan terorisme itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Untuk itu, metode yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis wacana Halliday-Hassan yang memfokuskan pada tiga hal, pelibat wacana, medan wacana, dan mode wacana. Teks yang dianalisis adalah teks dalam berita-berita dan artikel di website resmi Muhammadiyah.

KAJIAN PUSTAKA

Secara umum banyak kalangan yang mengaitkan orang-orang Islam dan kelompok-kelompok Islam yang melakukan aksi terorisme itu sebagai Islam radikal (radikalisme) atau Islam fundamentalis (fundamentalisme). Penggunaan istilah Islam radikal dan Islam fundamentalis dalam beberapa hal juga mengandung bias dan menimbulkan kritikan. Istilah fundamentalisme misalnya, pada awalnya adalah digunakan di kalangan Kristen yakni kelompok yang menolak modernitas. Tentu sangat berbeda bila digunakan dalam Islam, yang mengartikan fundamentalisme sebagai pemahaman agama Islam secara mendasar. Bahkan terdapat perbedaan juga antara fundamentalisme Timur Tengah dengan fundamentalisme Indonesia (Azra, 1996). Dalam perkembangannya, istilah fundamentalisme dan radikalisme mengalami keaburan karena dimaknai dan disejajarkan dengan makna negatif seperti kekerasan, terorisme, ekstremisme, dan jihad serta ancaman terhadap peradaban dan kemanusiaan. Sehingga relasi yang terbangun kemudian Islam identik dengan segala bentuk terorisme dan kekerasan (Badarussyamsi, 2015).

Radikalisme memiliki pengertian sebagai pendekatan yang bersifat tidak kompromistis atas persoalan-persoalan sosial dan politik yang ditandai adanya rasa tidak puas yang dalam terhadap kondisi yang berlangsung. Karena itu mereka terpenggil untuk melakukan perubahan secara fundamental. Dalam hal ini gerakan kelompok Islam radikal dapat diartikan sebagai tindakan yang secara sadar dilakukan yang dilandasi oleh seperangkat sistem keyakinan (ideologi) yang dianut kelompok-kelompok radikal tersebut. Kelompok-kelompok Islam radikal ini memperjuangkan dan mewujudkan aspirasinya, menyebar gagasannya, dan mempertahankan diri

ketika ide-ide tersebut berhadapan dengan ide atau gagasan dari luar yang berbeda atau berlawanan (Mubarak, 2007: 53).

Gerakan radikal menunjukkan penolakan dan perlawanan terhadap kondisi dan sistem yang ada. Bahkan gerakan radikal bukan sekedar menolak, tapi juga juga berupaya mengganti tatanan lama secara mendasar dan menyeluruh (*radic*) dengan tatanan lain. Selain itu, karena kuatnya keyakinan ideologinya yang paling benar, kelompok radikal sering menampilkan sikap emosional dan terlibat kekerasan (Al Makassary dan Gaus, 2010: 20).

Ciri penting dari gerakan radikal adalah cara pandang dan sikap politik yang menghendaki perubahan total dalam kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, tidak semua gerakan Islamis dapat dikategorikan radikal. Salah satu karakter menonjol dari Islam radikal adalah penekanan pada totalitas Islam yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan keunggulan Islam sebagai ajaran yang dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial. Karakter lainnya dari kelompok radikal adalah penyerangan terhadap ideologi-ideologi modern lainnya seperti kapitalisme, sosialisme, dan liberalisme. Selain itu, ideologi radikal juga mengajarkan jihad melawan kaum kafir sebagai kewajiban setiap muslim dan merupakan ibadah yang mulia.

Secara global, genealogi gerakan Islam fundamental dapat ditelusuri dan seringkali dikaitkan gerakan keagamaan Wahabiyah yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1791) yang bertujuan untuk purifikasi Islam. Pada era kontemporer, Wahabi seringkali dihubungkan dengan tindakan kekerasan dan terorisme. Termasuk pengaruhnya terhadap Osama bin Laden dan al Qaeda, yang menurut Behnam Bahari dan Mehdi Bakhsi, merupakan Neo-Wahabisme (Badarussyamsi, 2015: 79). Selanjutnya, gerakan Islamisme di dunia Islam berkembang melalui pemikiran Hasan al-Banna (1906-1948) pendiri Ikhwanul Muslimin di Mesir, dan Abul A'al al-Maududi (1903-1978), pendiri Jama'at al-Islami di Pakistan (Hasan, 2008: 19). Tokoh-tokoh lain yang berpengaruh dalam gerakan Islam fundamentalis global di antaranya adalah Yusuf al Qardhawi, Sayyid Qutb (1906-1966), Hasan Al Turabi (1932-), yang menggulirkan Islamisasi di Sudan, dan Taqiyuddin an Nabhani (1909-1977), pendiri Hizbut Tahrir yang salah satu gagasannya adalah mendirikan Daulah Khilafah Islamiah (Mubarak, 2007).

Gerakan fundamental global Kontemporer juga dikaitkan dengan Revolusi Iran (1979). Revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini merupakan bentuk protes terhadap aktivitas Barat di dunia Islam, dan atas berkembangnya budaya Barat dalam dunia Islam. Pengamat menyebutkan bahwa Revolusi Iran membawa pengaruh besar kepada negara-negara Islam di

dunia. Dinamika gerakan fundamentalis global pun berpengaruh kepada gerakan-gerakan serupa di Indonesia. Noorhaidi Hassan (2008: 31) menyebut fenomena tersebut sebagai ekspansi kaum salafi di beberapa kota di Indonesia, yang ditandai dengan kemunculan atribut-atribut keislaman seperti jubah, serban, jenggot panjang, dan sejenisnya.

Dalam konteks Indonesia, secara lebih spesifik munculnya gerakan radikalisme dan fundamentalis dapat dilihat sebagai respon terhadap situasi politik domestik pada masa Orde Baru dan era reformasi. Pada awal tahun 1980-an misalnya, gerakan-gerakan Islam radikal banyak dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan politik Orde Baru seperti pelarangan pemakaian jilbab di sekolah, RUU Perkawinan, dan kebijakan mengenai program Keluarga Berencana (KB). Sedangkan pada era reformasi, gerakan-gerakan Islam radikal banyak dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah saat itu yang berkaitan dengan Kristenisasi, termasuk konflik Ambon, kemaksiatan yang merajalela seperti perjudian, pelacuran, pornografi, dan minuman keras, serta penegakan syariat Islam dan gagasan khilafah di Indonesia (Mubarak, 2007).

Secara umum, gerakan Islam radikal di Indonesia selalu berkaitan dengan beberapa isu utama. Mubarak (2007), menyebutkan tindakan radikalisme dan sikap fundamentalisme akan muncul bila ia dikonfrontir dengan sejumlah isu seperti konsep Islam tentang kekuasaan, hubungan Islam dengan demokrasi, hak-hak politik perempuan dalam Islam, persoalan minoritas di dunia Islam, dan persoalan hak asasi manusia. Studi yang dilakukan oleh *Center for the Study of Religion and Culture*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta mengenai Benih-benih Islam Radikal di Masjid (2010), menggunakan lima isu ideologis yang diperjuangkan dan direspon secara aktif oleh kelompok Islam radikal-fundamental. Pertama, isu sistem pemerintahan yang meliputi penegakkan khilafah Islamiyah dan negara Islam melawan sistem demokrasi. Kedua, isu penegakan syariah Islam berhadapan dengan sistem konstitusional yang demokratis. Ketiga, isu jihad sebagai perang melawan musuh-musuh Islam. Keempat, isu kesetaraan perempuan dalam kehidupan publik, dan kelima isu keragaman dalam beragama (pluralisme), termasuk di dalamnya toleransi terhadap non-muslim.

Berkaitan dengan istilah diskursus atau wacana, adalah dipopulerkan oleh Michel Foucault. Wacana adalah keseluruhan bidang (domain) di mana bahasa dipakai dalam cara-cara tertentu. Dalam diskursus keseluruhan wilayah konseptual di mana pengetahuan itu dikonstruksi atau dibentuk, dan dihasilkan (Lubis, 2014). Istilah diskursus sendiri dapat digunakan dalam konteks yang luas dan dipakai untuk beberapa disiplin. Diskursus, menurut Norman Fairclough (1995),

setidaknya dapat dibagi dalam dua area. Pertama dalam kajian bahasa, diskursus adalah sebagai tindakan sosial dan interaksi, di mana orang-orang berinteraksi bersama dalam situasi sosial yang nyata. Selain itu, diskursus juga digunakan dalam teori sosial post-strukturalis, yang memandang diskursus sebagai konstruksi realitas sosial, sebagai sebuah bentuk pengetahuan. Diskursus juga dapat dilihat sebagai beberapa urutan dari benda atau entitas, tapi ia sendiri adalah bagian-bagian dari relasi yang rumit termasuk relasi pada komunikasi antara orang-orang yang berbicara, menulis, dan cara-cara komunikasi yang lain dengan orang lain, tapi juga menjelaskan hubungan antara peristiwa-peristiwa komunikatif yang nyata (percakapan, surat kabar, artikel, dan lain-lain), dan yang lebih abstrak dan lama seperti bahasa, diskursus dan genre (Fairclough, 2010).

Menurut Ricoeur teks adalah setiap diskursus yang dibakukan lewat tulisan. Maka dari itu, diskursus selalu terkait dengan penggunaan bahasa (2006). Secara lebih khusus lagi, Ricoeur merujuk bahasa sebagai peristiwa (*event*), yakni bahasa yang membicarakan tentang sesuatu. Pengertian ini mengikuti pendapat ahli bahasa Austin dan Beardsley yang membagi bahasa ke dalam dua sifat, yaitu bahasa sebagai *meaning* dan bahasa sebagai *event*. Jadi, diskursus adalah bahasa ketika ia digunakan untuk berkomunikasi (Permata, 2013: 256).

HASIL KAJIAN

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil kajian mengenai diskursus gerakan radikalisme di kalangan tolok Muhammadiyah. Terdapat tiga isu utama yang berkaitan dengan gerakan radikalisme yang menjadi fokus kajian, yaitu bentuk negara, jihad, dan toleransi. Selanjutnya ketiga isu tersebut dianalisis dengan analisis wacana model Hassan-Halliday yang menekankan tiga elemen wacana yaitu pelibat wacana (*tenor of discourse*), medan wacana (*field of discourse*), dan mode wacana (*mode of discourse*). Pelibat wacana mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pembicaraan, serta kedudukan dan hubungan di antara mereka. Medan wacana merujuk pada tindakan sosial yang sedang terjadi atau yang dibicarakan di mana pelaku terlibat di dalamnya. Sedangkan mode wacana merujuk pada pilihan bahasa yang digunakan, termasuk penggunaan gaya bahasa tertentu (Sudibyo, 2001: 129).

a. Bentuk dan Dasar Negara

Berkaitan dengan pelibat wacana, yakni orang-orang yang terlibat dalam diskursus mengenai bentuk negara, terdapat beberapa tokoh Muhammadiyah ditampilkan. Tokoh-tokoh

Muhammadiyah tersebut adalah Din Syamsuddin (Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah), Haedar Nashir (Ketua Umum PP Muhammadiyah), Abdul Mu'thi (Sekretaris Umum PP Muhammadiyah), dan Agung Danarto (Sekretaris PP Muhammadiyah).

Sedangkan pada medan wacana, atau apa yang dibicarakan oleh para pelibat wacana terdapat kesepahaman dari tokoh-tokoh Muhammadiyah bahwa bentuk negara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Pancasila sebagai dasar negara. Meskipun demikian terdapat penekanan yang berbeda berkaitan dengan diskursus bentuk negara dan dasar negara di kalangan tokoh Muhammadiyah. Berikut medan wacana para tokoh Muhammadiyah mengenai bentuk dan dasar negara.

Din Syamsuddin mewacanakan, meskipun Pancasila sudah menjadi kesepakatan namun Pancasila sebenarnya sangat multitafsir. Untuk itu Din mendorong umat Islam untuk ikut berkompetisi memberi tafsiran terhadap Pancasila. Din mengatakan, "Umat Islam harus turut serta dalam kontestasi tafsir, harus berani mengajukan tafsirnya terhadap pancasila. Dengan turut bersiap menghadapi kontestasi tafsir ini, menjadi perwujudan dari kepentingan 'durus-syahadah' atau dalam rangka mengisi negara ini setelah adanya kesepakatan. Menurutnya, sila pertama sebagai dasar tauhid harus tetap dipertahankan. Dengan artian bahwa ketuhanan yang maha esa lebih memiliki posisi yang lebih tinggi, lebih dalam dan lebih luas dari 7 kata yang sebelumnya. Karena jika dikaitkan hanya dalam ranah syariah, maka tentunya akan terbatas".

Sedangkan Haedar Nashir mewacanakan Negara Pancasila sebagai Dar al-Ahdi wa al-Syahada. Menurut Haedar, "Salah satu keputusan penting Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar pada 3-7 Agustus 2015 adalah tawaran konsep Negara Pancasila sebagai Dar al-Ahdi wa al-Syahadah. Pemikiran kolektif Muhammadiyah tentang Negara Pancasila ini bersifat mengikat dan menjadi keputusan resmi yang harus dipahami dan dijalankan oleh seluruh kader, anggota, dan warga Persyarikatan Muhammadiyah".

Lebih lanjut Haedar mengatakan, "Meskipun tidak ditemukan bentuk negara Pancasila dalam al-Quran, namun sampai saat ini juga belum ditemukan sistem pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, sebagian dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai Qurani telah diaplikasikan dalam negara Pancasila. Muhammadiyah memandang Pancasila sebagai titik temu seluruh komponen bangsa."

Adapun Abdul Mu'thi lebih menegaskan lagi mengenai sikap Muhammadiyah secara organisasi menerima Pancasila sebagai bentuk ideal, baik yang bersifat filosofi maupun idiologis. Mu'thi menjelaskan bahwa Muhammadiyah perlu membuat suatu pernyataan bahwa secara organisasi Muhammadiyah menerima Pancasila sebagai bentuk ideal, baik yang bersifat filosofi maupun idiologis. Bahkan juga secara konstitusional dalam hal berbangsa dan bernegara. Bagi Muhammadiyah tidak ada agenda lagi untuk mempersoalkan Pancasila sebagai Dasar Negara dan tidak ada agenda untuk menentang NKRI sebagai suatu bentuk negara yang Muhammadiyah ada di dalamnya. Tugas dan agenda Muhammadiyah dalam masa depan adalah bagaimana merawat ke-Indonesian ini dan bagaimana memajukan Indonesia dengan berdasarkan prinsip-prinsip dari paham Islam yang Berkemajuan sebagai karakter dari Persyarikatan dan Gerakan Muhammadiyah”.

Sedangkan Agung Danarto menjelaskan bahwa Pancasila merupakan tafsir kontekstual dari nilai-nilai ajaran dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Agung menjelaskan, “Bahwa Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia merupakan tafsir kontekstual dari pemahaman terhadap Al-Quran dan Hadis. Pancasila merupakan tafsir kontekstual dari nilai-nilai ajaran dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dari segi nilai-nilai moral, kandungan Pancasila sangat sesuai dengan ajaran Qur'an. Misalkan sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, memuat dimensi tauhid atau akidah. Meskipun kalimat “dan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya” ditiadakan, sama sekali tidak mengurangi esensi dari sila pertama itu”.

Lebih lanjut Agung mengatakan, “secara garis besar, poin-poin Pancasila dianggap oleh Muhammadiyah sesuai dengan ajaran Islam dan sesuai dengan Muhammadiyah. Menurut Agung, Pancasila ditafsirkan oleh Muhammadiyah sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyahannya, untuk mewujudkan tujuan bernegara yaitu mencapai *baladun tayyibatun warabbun ghafur*. Cita-cita negara dan cita-cita Muhammadiyah itu sama, dalam rangka mewujudkan negara sejahtera, adil, makmur sentosa.

Berkaitan dengan mode wacana, atau pilihan bahasa yang digunakan terdapat beberapa gaya bahasa yang ditampilkan yaitu naratif, argumentatif, dialogis, dan metaforis. Penggunaan bahasa naratif dan argumentatif dipakai untuk menjelaskan dan meyakinkan mengenai pandangan Muhammadiyah tentang bentuk dan dasar negara. Sedangkan bahasa dialogis digunakan saat wawancara dengan Abdul Mu'thi. Adapun bahasa metaforis digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah padanan seperti *baladun tayyibatun warabbun ghafur*, dan Dar al-

Ahdi wa al-Syahada. Secara garis besar diskursus mengenai bentuk dan dasar negara dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Pandangan Tokoh Muhammadiyah mengenai Bentuk Negara

No	Pelibat Wacana	Medan Wacana	Mode Wacana
1	Din Syamsuddin (Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah)	Pancasila diwacanakan sebagai ideologi terbuka di mana Umat Islam harus turut serta dalam kontestasi tafsir terhadap Pancasila sebagai perwujudan dari kepentingan ‘durus-syahadah’	Argumentatif, Metaforis.
2	Haedar Nashir (Ketua Umum PP Muhammadiyah)	Pancasila diwacanakan sebagai darul ahdi wa syahadah yang bersifat mengikat dan menjadi keputusan resmi yang harus dipahami dan dijalankan oleh seluruh kader, anggota, dan warga Persyarikatan Muhammadiyah	Deskriptif. Argumentatif, Metaforis.
3	Abdul Mu’thi (Sekretaris Umum PP Muhammadiyah)	Pancasila diwacanakan sebagai bentuk ideal, baik yang bersifat filosofi maupun idiologis.	Dialogis Argumentatif, Metaforis.
4	Agung Danarto (Sekretaris PP Muhammadiyah)	Pancasila diwacanakan sebagai tafsir konstektual dari nilai-nilai ajaran dalam Al-Qur’an dan Sunnah.	Deskriptif. Argumentatif, Metaforis.

b. Jihad

Berkaitan dengan isu jihad, pelibat wacana yang tampil adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah yaitu Dahnil Azhar Simanjuntak (Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah), Dadang Kahmad (Ketua PP Muhammadiyah Bidang Pustaka, Informasi dan Komunikasi), Aidul Fitriada Azhari (Ketua Komisi Yusdisial), M. Nurul Yamin (Ketua MPM PP Muhammadiyah), dan Muhadjir Effendy (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan).

Sedangkan pada medan wacana atau topik yang dibicarakan oleh pelibat wacana, terdapat beberapa wacana mengenai jihad. Menurut Dahnil Azhar Simanjuntak (Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah), jihad diwacanakan sebagai dakwah amar makruf nahi munkar.

“Jihad dalam berdakwah amar makruf nahi munkar. Berjuang melawan korupsi adalah salah satu bentuk jihad. Mengawal undang-undang serta mengadakan advokasi merupakan bentuk jihad. Disiplin serta berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah adalah bagian dari jihad”.

Jihad diwacanakan juga sebagai mengelola arsip secara rapi seperti yang disampaikan oleh Dadang Kahmad (Ketua PP Muhammadiyah Bidang Pustaka, Informasi dan Komunikasi). Dadang mengatakan, mengelola arsip secara rapi dan menyelenggarakan pelatihan untuk menghasilkan para pengelola arsip profesional merupakan bagian dari jihad”. Jihad juga dapat diwacanakan dalam bentuk jihad konstitusi sebagaimana yang disampaikan oleh Aidul Fitriadi Azhari (Ketua Komisi Yudisial). Menurut Aidul, jihad konstitusi Muhammadiyah adalah dengan melakukan Judicial Review (JR) atau uji materi terhadap segala bentuk UU yang melanggar UUD 1945 dan segala bentuk liberalisasi ekonomi yang berujung pada ketidakadilan social-ekonomi.

Dalam pandangan M. Nurul Yamin (Ketua MPM PP Muhammadiyah), jihad diwacanakan dalam bentuk gerakan kedaulatan pangan. Menurut Yamin, jihad Kedaulatan Pangan bukan semata masalah kenyang dan lapar melainkan menggelorakan budaya pangan, ekonomi pangan dan politik pangan. Gerakan itu mencakup peningkatan produksinya maupun menggelorakan gerakan kembali bertani. Sedangkan dalam pandangan Muhadjir Effendy (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), jihad diwacanakan dalam bentuk mendirikan masjid dan tempat pendidikan. Menurut Muhadjir, jihad harus sesuai ajaran Allah, yaitu jihad yang disertai sabar. Hampir ayat-ayat yang berkenaan dengan jihad, dikunci dengan kata sabar.

Berkaitan dengan mode wacana atau penggunaan bahasa dalam isu mengenai jihad di kalangan tokoh Muhammadiyah, secara umum banyak yang menggunakan bahasa secara deskriptif dan argumentatif. Hal ini karena dalam mewacanakan mengenai jihad, tokoh-tokoh tersebut perlu memberi penjelasan secara jelas dan dengan argumen yang baik. Beberapa tokoh lain juga menggunakan bahasa kilas balik untuk menjelaskan konteks jihad pada masa yang lalu dan konteks jihad yang dilakukan oleh Muhammadiyah selama ini.

Secara lebih jelas, wacana mengenai jihad di kalangan tokoh Muhammadiyah dapat dilihat pada tabel 2 di bawah.

Tabel 2. Pandangan Tokoh Muhammadiyah mengenai Jihad

No	Pelibat Wacana	Medan Wacana	Mode Wacana
1	Dahnil Azhar Simanjuntak (Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah)	Jihad diwacanakan sebagai dakwah amar makruf nahi munkar dalam bentuk berjuang melawan korupsi adalah jihad. Mengawal undang-undang serta mengadakan advokasi merupakan jihad. Disiplin serta berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah adalah jihad.	Simbolisme Metaforis
2	Dadang Kahmad (Ketua PP Muhammadiyah Bidang Pustaka, Informasi dan Komunikasi).	Jihad diwacanakan dalam bentuk mengelola arsip amal usaha secara rapi.	Deskriptif
3	Aidul Fitriadi Azhari (Ketua Komisi Yudisial)	Jihad diwacanakan sebagai jihad konstitusi dalam bentuk Judicial Review (JR) atau uji materi terhadap segala bentuk UU yang melanggar UUD 1945.	Kilas balik Deskriptif
4	M. Nurul Yamin (Ketua MPM PP Muhammadiyah)	Jihad diwacanakan sebagai gerakan Kedaulatan Pangan dalam bentuk peningkatan produksi maupun menggelorakan gerakan kembali bertani.	Deskriptif Argumentatif
5	Muhadjir Effendy (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)	Jihad diwacanakan dengan mendirikan masjid dan mendirikan tempat-tempat pendidikan.	Kilas Balik Deskriptif

c. Toleransi

Pelibat wacana atau tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ditampilkan berkaitan dengan isu toleransi adalah Azyumardi Azra (Cendekiawan Muslim), Dahnil Anzar Simanjuntak (Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah), Haedar Nasir (Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah), Abdul Mu'ti (Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah), A Syafiq Mughni (Ketua PP Muhammadiyah), dan Din Syamsuddin (Ketua Dewan Pertimbangan MUI dan Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005-2015).

Adapun medan wacana atau isu-isu yang ditonjolkan oleh kalangan tokoh Muhammadiyah berhubungan dengan toleransi sangat beragam. Namun intinya mereka menegaskan bahwa umat Islam, khususnya kalangan warga dan tokoh Muhammadiyah itu sangat toleran dan terbuka, serta tidak radikal. Seperti yang disampaikan oleh Dahnil Anzar Simanjuntak (Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah) yang menyatakan bahwa KH Ahmad Dahlan merupakan sosok yang sangat toleran dan terbuka. Dahnil juga mengatakan bahwa saat ini Toleransi lebih sering dipertontonkan sebagai komoditas isu ketimbang diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa.

Sedangkan menurut Azyumardi Azra (Cendekiawan Muslim), pada dasarnya orang Indonesia merupakan masyarakat yang sangat religious. Bila kemudian dituduh intoleran itu karena pengaruh dari luar, terutama dari Timur Tengah. Azyumardi mengatakan, “salah satu faktor penyebab intoleransi umat muslim karena gejolak di negara Timur Tengah saat ini. Benih intoleransi itu ternyata sampai ke Indonesia”. Menurut Haedar Nasir (Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah), salah satu bukti bahwa umat Islam Indonesia sangat toleran adalah damainya pelaksanaan natal. Haedar mengatakan, “damainya pelaksanaan Natal tahun ini merupakan salah satu bukti bahwa umat beragama di Indonesia merupakan umat yang bisa sangat bertoleransi dan hidup dalam kemajemukan. Haedar juga menegaskan bahwa bagi yang paham sejarah panjang bangsa, maka akan mengerti bahwa umat Islam bukanlah perusak toleransi. Maka jika sekarang ada satu orang yang ingin menguji umat Islam dengan kebhinekaan bangsa ini, maka sesungguhnya itu merupakan ketidakpahaman sejarah.

Sementara itu A Syafiq Mughni (Ketua PP Muhammadiyah) tidak memungkiri bahwa toleransi dan kerukunan masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh setiap umat beragama. Menurut Syafiq, salah satu penyebabnya adalah bahwa masih ada disparitas antara ajaran agama dengan apa yang disampaikan oleh tokoh agama dalam ceramah keagamaan. Di

sisi lain Din Syamsuddin (Ketua Dewan Pertimbangan MUI dan Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005-2015), menyatakan bahwa Islam adalah agama perdamaian. Salah satu misi yang dibawa Nabi Muhammad adalah menyebarkan perdamaian kepada umat manusia di alam semesta. Din mengatakan, “kekerasan karena ekstrimisme yang membawa nama agama adalah sebuah bentuk penyalahgunaan. Tidak ada kekerasan apapun yang bisa mengatasnamakan agama.” Berkaitan dengan upaya meningkatkan toleransi, Abdul Mu’ti (Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah) menawarkan usulan untuk membuat kampung pluralis. Mu’ti menjelaskan, “selain dengan menawarkan paham keagamaan yang moderat atau tengahan antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri, perlu kiranya membentuk pemukiman yang pluralis.”

Selanjutnya, berkaitan dengan mode wacana yang digunakan para tokoh Muhammadiyah dalam mewacanakan isu toleransi ini secara umum lebih banyak menggunakan bahasa deskriptif dan argumentatif, serta beberapa menggunakan bahasa kilas balik. Bahasa kilas balik ini digunakan para tokoh untuk memberikan latar mengenai toleransi yang telah dilakukan tokoh-tokoh agama terdahulu, termasuk Nabi dan Sahabat. Sedangkan bahasa deskriptif dan argumentatif dipakai untuk lebih menyakinkan dan memberikan gambaran yang jelas mengenai pandangan para tokoh tentang toleransi dan permasalahannya. Secara lebih detil, pandangan para tokoh Muhammadiyah mengenai toleransi dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Pandangan Tokoh Muhammadiyah mengenai Toleransi

No	Pelibat Wacana	Medan Wacana	Mode Wacana
1	Azyumardi Azra (Cendekiawan Muslim)	Pada dasarnya orang Indonesia merupakan masyarakat yang sangat religious. Bila dituduh intoleran maka salah satu faktor penyebabnya karena gejala di negara Timur Tengah saat ini. Benih intoleransi itu ternyata sampai ke Indonesia.	Deskriptif Argumentatif
2	Dahnil Anzar Simanjuntak (Ketua Umum Pimpinan)	KH Ahmad Dahlan merupakan sosok yang sangat toleran, terbuka, dan membenci sikap fanatisme buta.	Kilas balik Deskriptif

	Pusat Pemuda Muhammadiyah)	Toleransi lebih sering dipertontonkan sebagai komoditas isu ketimbang diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa.	
3	Haedar Nasir (Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah)	Damainya pelaksanaan Natal tahun ini merupakan salah satu bukti bahwa umat beragama di Indonesia merupakan umat yang bisa sangat bertoleransi dan hidup dalam kemajemukan. Bagi yang paham sejarah panjang bangsa, maka akan mengerti bahwa umat Islam bukanlah perusak toleransi. Maka jika sekarang ada satu orang yang ingin menguji umat Islam dengan kebhinekaan bangsa ini, maka sesungguhnya itu merupakan ketidakpahaman sejarah.	Deskriptif Argumentatif
4	Abdul Mu'ti (Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah)	Selain dengan menawarkan paham keagamaan yang moderat atau tengahan antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri, perlu membentuk pemukiman yang pluralis.	Argumentatif Deskriptif
5	A Syafiq Mughni (Ketua PP Muhammadiyah)	Toleransi dan kerukunan masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh setiap umat beragama. Salah satu penyebabnya adalah masih ada disparitas antara ajaran agama dengan apa yang disampaikan oleh tokoh agama dalam ceramah keagamaan.	Kilas balik Argumentatif
6	Din Syamsuddin (Ketua Dewan Pertimbangan MUI dan Ketua Umum PP)	Islam adalah agama perdamaian. Salah satu misi yang dibawa Nabi Muhammad adalah menyebarkan perdamaian kepada umat manusia di alam semesta. Kekerasan karena ekstrimisme yang membawa nama	Naratif Kilas Balik

	Muhammadiyah periode 2005-2015)	agama adalah sebuah bentuk penyalahgunaan. Tidak ada kekerasan apapun yang bisa mengatasnamakan agama	
--	------------------------------------	---	--

DISKUSI

Pada dasarnya diskursus adalah sebagai tindakan sosial dan interaksi, di mana orang-orang berinteraksi bersama dalam situasi sosial yang nyata. Tujuan utama diskursus adalah memproduksi realitas sosial tertentu secara nyata. Interaksi-interaksi sosial yang terjadi tidak dapat secara penuh dipahami tanpa mengacu kembali kepada diskursus yang telah memberikannya makna. Secara lebih khusus, Paul Ricoeur memberikan definisi diskursus (*discourse*) yang terkait dengan terutama pemahaman terhadap teks. Teks adalah setiap diskursus yang dibakukan lewat tulisan. Maka dari itu, diskursus selalu terkait dengan penggunaan bahasa.

Berkaitan dengan diskursus mengenai radikalisme, terdapat berbagai pandangan mengenai asal-usul dan penyebab munculnya radikalisme. Secara sosiologis misalnya munculnya gerakan radikalisme adalah karena ekspansi kaum salafi Timur Tengah ke Asia. Dapat juga disebabkan karena ketidakadilan ekonomi-politik global dan standar ganda Barat terhadap negara-negara Islam. Selain itu, munculnya gerakan radikalisme juga dapat dibaca dari kesempatan dalam memahami teks-teks atau ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad, bentuk negara, dan juga toleransi dari sebagian orang Islam. Sehingga muncul diskursus bahwa jihad adalah perang atau membunuh, bentuk negara adalah khilafah, dan orang kafir adalah musuh yang harus diperangi (intoleransi). Termasuk akhirnya muncul diskursus bahwa orang Islam itu intoleran, agama Islam mengajarkan perang dengan dalih jihad, dan ingin mengganti sistem dan dasar negara Pancasila menjadi negara khilafah.

Hasil kajian ini yang menunjukkan sebuah diskursus yang lain atau berbeda yang diwacanakan oleh para tokoh Muhammadiyah. Mereka secara jelas menyuarakan diskursus yang lain untuk menandingi diskursus yang selama ini dominan mengenai gerakan radikalisme terutama berkaitan dengan isu bentuk atau dasar negara, perintah jihad, dan toleransi. Para tokoh Muhammadiyah mewacanakan bahwa para tokoh Muhammadiyah sepakat bahwa Pancasila merupakan kesepakatan terbaik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga tidak perlu dicari penggantinya, khilafah sekalipun. Para tokoh Muhammadiyah juga mewacanakan bahwa jihad bukanlah sekadar perang atau bom bunuh diri, tetapi jihad juga bermakna macam-macam semisal

memerangi korupsi, mendirikan sarana pendidikan, bahkan ada jihad konstitusi, jihad ketahanan pangan, dan lain sebagainya. Terakhir, para tokoh Muhammadiyah sangat percaya bahwa umat Islam sangat toleran dan terbuka, dan hal itu sudah terwujud dari teladan Nabi, Sahabat, dan para tokoh umat Islam yang ada.

Mengetengahkan diskursus yang berbeda dari diskursus yang selama ini ada oleh para tokoh Muhammadiyah sesungguhnya dapat dipahami sebagai strategi Muhammadiyah untuk menyegah berkembangnya gerakan radikalisme. Hal ini penting karena salah sebab munculnya gerakan radikalisme adalah pemahaman teks yang dibajak dengan makna tertentu yang kemudian diwacanakan secara terus menerus tokoh-tokoh tertentu melalui berbagai saluran terutama media sosial. Jadi diskursus yang disampaikan oleh para tokoh Muhammadiyah ini bisa menjadi semacam kontra-diskursus bahwa umat Islam itu bukan intoleran apalagi teroris, tidak anti-Pancasila, dan tidak hendak menggantinya dengan khilafah, serta umat Islam itu bukan tukang perang apalagi membunuh orang tanpa dosa.

PENUTUP

Sebagai simpulan, Pertama, mengenai bentuk dan dasar negara, para tokoh Muhammadiyah sepakat bahwa Pancasila kesepakatan terbaik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga tidak perlu dicari penggantinya. Kedua, mengenai jihad, para tokoh Muhammadiyah mewacanakan jihad dengan berbagai makna yang intinya jihad bukanlah sekadar perang atau bom bunuh diri. Terakhir mengenai toleransi para tokoh Muhammadiyah percaya bahwa umat Islam sangat toleran dan terbuka, dan hal itu sudah terwujud dari teladan Nabi, Sahabat, dan para tokoh umat Islam. Sebagai penutup, mengutip pernyataan Din Syamsuddin di hadapan Paus Fransiscus dan tokoh agama dunia, bahwa Islam adalah agama perdamaian. Salah satu misi yang dibawa Nabi Muhammad adalah menyebarkan perdamaian kepada umat manusia di alam semesta. Kekerasan karena ekstrimisme yang membawa nama agama adalah sebuah bentuk penyalahgunaan. Tidak ada kekerasan apapun yang bisa mengatasnamakan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeney-Risakotta, B. *The Impact of September 11 on Islam in Southeast Asia*. Dalam Nathan, K.S & Kamali M.H. (editor) 2005. *Islam in Southeast Asia: Political, Social and Strategic Challenges for the 21st Century*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Ali, A.S. 2014. *Al-Qaeda Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya*. Jakarta: LP3ES.
- Al Makassary, R & Gaus, AAF. 2010. *Benih-benih Islam Radikal di Masjid Studi Kasus Jakarta dan Solo*. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah.
- Azra, A. *Islamic Thought: Theory, Concepts, and Doctrine in The Context of Southeast Asian Islam*. Dalam Nathan, K.S & Kamali M.H (editor) 2005. *Islam in Southeast Asia: Political, Social and Strategic Challenges for the 21st Century*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Badrussyamsi. 2015. *Fundamentalisme Islam Kritik atas Barat*. Yogyakarta: LKiS.
- Fairclough, N. 2010. *Critical Discourse Analysis the Critical Study of Language*. Edinburgh: Logman Applied Linguistics.
- Hasan, N. 2008. *Laskar Jihad Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: LP3ES-KITLV.
- Hasan, N. *September 11 and Islamic Militancy in Post-New Order Indonesia*. Dalam Nathan, K.S & Kamali M.H. (editor) 2005. *Islam in Southeast Asia: Political, Social and Strategic Challenges for the 21st Century*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Lubis, A.Y. 2015. *Pemikiran Kritis Kontemporer: Dari Teori Kritis, Cultural Studies, Feminisme, Postkolonial Hingga Multikulturalisme*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mubarak, M.Z. 2007. *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*. Jakarta: LP3ES.
- Nashir, H. 2014. *Memahami Ideologi Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Ricoeur, P. 2006. *Hermeneutika Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. Diterjemahkan oleh Muhammad Syukri dari judul asli: *Hermeneutics and the Human Sciences Essay on Language, Action, and Interpretation*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
- Salim, A & Azra, A. (eds) 2003. *Shariah and Politics in Modern Indonesia*. Singapore: ISEAS.
- Sudibyo, A. 2001. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKiS.

Majalah dan Surat Kabar:

Kompas, 5 Juni 2015.

Tempo, edisi 4-10 Agustus 2014

Tempo, edisi 6-12 April 2015